

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adriaman, M. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Amalia, M., & Tajuddin, M. A., & Kapelele, F. (2025). *Buku Ajar Pembaharuan Hukum Pidana*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Arief, M. I. (2021). *Pertimbangan yuridis putusan bebas & upaya hukum kasasi perkara pidana*. MCL Publisher.
- Budhi, I., & Kade, G. (2021). *Hukum Pidana Progresif: Konsep dan Penerapan dalam Perkara Pidana*. PT Raja Grafindo Persada.
- Cahyani, T. D. (2023). *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktek)*. Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Dewi, D. K. (2025). *Fondasi Ilmu Hukum: Teori, Asas, dan Sistem Hukum*. PT Serasi Media Teknologi.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Fransisco. (2024). *Perspektif Hukum dan Keadilan pada Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tanpa Peninjauan Kembali*. Penerbit Adab.
- Gunardi. (2022). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Damera Press.
- Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish.
- Hamidi, J. (2014). *Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat & Metode Tafsir) Edisi Revisi*. Universitas Brawijaya Press.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kamello, H. T. (2022). *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni.
- Kurniawan, B., & Sholihin, R. A., & Basri, A. H. (2021). *Praktik Pengalaman Beracara Pidana*. Klik Media.
- Margono, H. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika.
- Masidin. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode penelitian hukum*. UPT. Mataram University Press.
- Pauzi, M. (2024). *Paradigma penelitian kualitatif dan kuantitatif*. PT Arr Rad Pratama.
- Redi, A. (2018). *Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan*. Sinar Grafika.

- Ridha, N. A. N., Andriyani, W., Kurniawan, E., Afriyanti, L., Maipauw, M. M., Amri, S. R., & Riauwati, J. (2025). *Masyarakat Digital Dan Kebebasan Berpendapat: Integrasi Perspektif Hukum, Etika, Dan Literasi Teknologi*. Penerbit Widina.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.
- Surbakti & Natangsa, S. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. In Muhammadiyah University Press.
- Susanti, D. I. (2021). *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Thahir, T., Meliana, Y., Sari, L., Suwito, S., Suriani, R., Telaumbanua, D, Reumi, F. (2024). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wibowo, K, T. (2021). *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pustaka Aksara.
- Waluyo, B. (2008), *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.
- Warsiman. (2021). *Pengaturan Pidana Mati di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Guepedia.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Publika Global Media.

Artikel dalam Jurnal:

- Andrew, A., & Rahaditya, R. (2023). *Implementasi Asas Ne Bis In Idem dalam Putusan Hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap pada Perkara Pidana*. UNES Law Review, 6(1), 2102-2107.
- Angin, A. S. B. P., Hartono, M. S., & Suastika, I. N. (2022). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid. Sus/2021/Pn Sgr)*. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(3), 145-161.
- Arifin, A. (2023). *Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*. IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research, 1(1), 6–10.
- Cahyaningtyas, K. (2025). *Analisis Penjatuhan Putusan Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Didakwakan Dalam Surat Dakwaan Ditinjau Menurut Teori Progresif (Studi Putusan Nomor: 17/Pid. Sus/TPK/2014/Pn. Jkt. Pst)*. Jurnal Sumber Hukum, 2(2), 14-29.
- Chandra, K., & Rahaditya, R. (2023). *Peran Penting Penasihat Hukum dalam Peradilan Pidana Untuk Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Tersangka Atau Terdakwa*. UNES Law Review, 6(1), 3803-3810.

- Dewi, A. K., Hartono, M. S., & Hadi, I. G. A. A. (2025). *Efektivitas Penegakan Hukum Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Di Kota Singaraja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024*. *Journal Of Law And Nation*, 4(1), 6-25.
- Dewi, N. N. A. P., Hartono, M. S., & Dantes, K. F. (2022). *Implementasi prinsip restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng*. *Jurnal komunitas yustisia*, 5(1), 242-253.
- Diar, A., Jufri, B. A., & Widodo, R. S. (2025). *Tinjauan Filosofis Asas Ultra Petita Dalam Perkara Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar*. *Limbago: Journal of Constitutional Law*. Vol. 5 (2), 33-54.
- Dilla, S. N., & Yuherman, Y. (2020). *Analisis Yuridis Tentang Hal Yang Memberatkan Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 2(2), 235-251.
- Eugenia, F., Limanto, C. J., & Tedjokusumo, D. D. (2024). *Tantangan Praktis dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana: Kredibilitas Saksi dan Validitas Bukti Elektronik*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 492-503.
- Farah, A. N., Isnaningtyas, F., & Uma, Z. (2016). *Pengabaian Pasal 182 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) KUHP Oleh Hakim Pengadilan Negeri Martapura Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum*. *Jurnal Verstek*, 4(2).
- Fernando, Z. J. (2021). *Due Process of Law dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Indonesia*. *Jurnal Majalah Keadilan*, 21(1), 67-89.
- Flora, H. S. (2018). *Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. *UBELAJ Jurnal*, 3(2), 142-158.
- Hadi, I. G. A. A. (2017). *Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. *Kertha Patrika*, 39(01), 33-46.
- Hananta, D. (2018). *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol 7(1), 87.
- Hartono, M. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). *Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 281-302.
- Hutasoit, S, U & Nababan, R. (2025). *Peran Pengadilan Dalam Menangani Perkara Perdata Yang Sudah Lama Tetapi Belum Diputus Karena Para Pihak Masih Dalam Proses Damai*. *Jurnal Hukum Progresif*, 8 (1), 43-51.
- Idary, M. T. (2023). *Asas-Asas Hukum Keluarga Islam*. *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 4 No. 2. 4(2), 168-179.

- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). *Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(2), 217-227.
- Juniansyah, E., & Zahri, S. (2024). *Putusan Hakim dalam Memutus Perkara di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 24(1), 39.
- Jusrin, M., & Prianto, W. (2024). *Upaya Mewujudkan Keadilan Rehabilitatif Dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Kendari (Studi Perkara Nomor: 257/PID. B/2023/PN. KDI)*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 2(1), 102-111.
- Kertih, I. W. (2020). *Peningkatan kualitas perkuliahan mata kuliah hukum acara pidana melalui penerapan model pembelajaran social problem solving pada mahasiswa program studi ppkn fhis undiksha*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(3), 136-144.
- Maulidya, G. Z., Rahmawati, S. N., Rahmawati, V., & Mardany, A. F. (2023). *Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*. HUKMY : Jurnal Hukum, 3(1), 211–230.
- Mawati, R., Worang, E. N., & Rompas, D. D. (2023). *Pertimbangan Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst)*. Lex Crimen, 12(2), 5.
- Muhammad, R. N., & Tanggahma, B. (2024). *Pengaruh Media Sosial Pada Persepsi Publik Terhadap Sistem Peradilan: Analisis Sentimen di Twitter*. UNES Law Review, 7(1), 507-516.
- Mulyati, N. (2025). *Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination)*. Unes Journal of Swara Justisia, 8(4), 725-734.
- Musfa, N. H. De, S., & Syaufi, A. (2024). *Asas Ultra Petita dalam Perspektif Keadilan*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(2), 28706–28716.
- Muwahid, M. (2017). *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*. Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 7(1), 224-248.
- Napitupulu, M., & Koswara, I. Y. (2025). *Perlindungan Anak Dari Reviktimisasi Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi dan Undang Undang Sistem Peradilan Anak*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 11(1), 107-130.

- Ngape, H. B. A. (2018). *Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum*. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1).
- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). *The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes*. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1-21.
- Pakpahan, R. D., Manullang, H., & Nababan, R. (2019). *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA)*. *PATIK: Jurnal Hukum*, 07(2), 123–136.
- Pinatih, N. K. W. A. (2024). *Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur Dalam Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum*. *Justitia et Pax*, 40(1), 135-163.
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). *Tinjauan sistem peradilan pidana dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka di Indonesia*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402-417.
- Pudyatmoko, Y. S. (2023). *Putusan Ul Putusan Ultra Petita Penanganan Kasus K An Kasus Korupsi Menurut Perspektif Hakim*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53 No, 253.
- Ramadhani, N. L., Widyawati, R. H., & Putra, M. A. R. D. (2025). *Analisis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rangkap Jabatan Di Indonesia Dalam Perspektif Ilmu Negara Dan Hukum Tata Negara. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(2), 641-650.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana*. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188.
- Rusdiono.A.Z.S, Fitriani.F.N , Taruna.H.R , Anjani.P.A & Supriyadi.T. (2025). *Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Perilaku*. *Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*. 2 (1). 3063-0517.
- Sanjaya, A. A., Hartono, M. S., & Ardhya, S. N. (2022). *Penggunaan Akun Media Sosial Sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Proses Penyidikan*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 482-499.
- Setyanegara, E. (2013). *Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4), 434-468.

- Shadiq, J., Janaputri, A., & Zalfa, A. (2025). *Kepastian Hukum Dan Aupb Dalam Perkara Sk Menkumham*. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1), 2261-2270.
- Silalahi, W & Antonio, M, L. (2025). *Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Era Digital: Analisis Kesesuaian KUHAP dan KUHP Baru terhadap Kebutuhan Teknologi Informasi dalam Perspektif Ketatanegaraan*. *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 3 (4), 121-133.
- Sukmana, T., & Rusli, T. (2022). *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan*. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 3(1), 62–68.
- Taurisanto, A. Y., Pawennei, M., & Zainuddin, Z. (2023). *Penerapan Asas Kebebasan Hakim Didalam Putusan Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika*. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(1), 140-163.
- Triantono, T., & Marizal, M. (2021). *Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana*. *Justitia et Pax*, 37(2), 267–286.
- Wilda, S. L., & Ali, D. (2018). *Kajian Yuridis Putusan Hakim Yang Bertentangan Dengan Surat Dakwaan Dalam Perkara Narkotika*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* , 2(2), 363–374.

Skripsi / Penelitian Terdahulu:

- Kurniasari, A. (2024). *Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 182 Ayat (4) Kuhap Terhadap Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Di Luar Surat Dakwaan Penuntut Umum (Studi Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Wno)*. (Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat).
- Meisa, R. (2015). *Ultra Petita Oleh Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. (Skripsi, Universitas Jember).

Artikel dalam Internet:

- Amal, B. (2023). *Penerapan Voeging Ad Informandum dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-voeging-ad-informandum-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia-lt63f32868874bf/?page=all>.
- Amirulloh, M. (2022). *Perbedaan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Hukum*. Muhamad Amirulloh's Blog. Unpad.ac.id. <https://blogs.unpad.ac.id/muhamadamirulloh/2022/12/08/perbedaan-skripsi-tesis-dan-disertasi/>
- Pratiwi, M, A, P, S. H. (2025). *Peringatan dan Pemberatan Hukuman dalam Hukum*

Pidana. Perqara. [https://Perqara.Com/Blog/Pemberatan-Hukuman/#:~:Text=dalam%20Hukum%20Pidana-Faktor%2Dfaktor%20yang%20memberatkan%20hukuman%20\(Aggravating%20factors\),Seperti%20pada%20Pasal%2052a%20KUHP](https://Perqara.Com/Blog/Pemberatan-Hukuman/#:~:Text=dalam%20Hukum%20Pidana-Faktor%2Dfaktor%20yang%20memberatkan%20hukuman%20(Aggravating%20factors),Seperti%20pada%20Pasal%2052a%20KUHP).

Wahyuni, W. (2023). *Mengenal Prinsip Ultra Petita*. HukumOnline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-prinsip-ultra-petita-lt63f335f902f77/>.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional. (Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. (Lembar Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembar Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembar Negara Tahun 2001 Nomor. 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. (Lembar Negara Tahun 2025 Nomor. 188, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 7149).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor. 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU.

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2262 K/PID.SUS/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU/XIV/2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 290/K/PID.SUS/2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/PID/2023.

Putusan Nomor 47/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Putusan Nomor 612/PID.SUS/2015/PT-MDN.

Putusan Nomor 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.

Putusan Nomor 314/PID.SUS/2015/PN RAP.

Putusan Nomor 796/PID.B/2022/PN JKT. SEL.

